



Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan kesejahteraan Nelayan di Kota Padang

Jihan Anfiska, Aldri Frinaldi*

Departemen Ilmu Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negera Padang

jihananfiska21@gmail.com, aldri@fis.unp.ac.id

Abstrak

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian masyarakat pesisir di Kota Padang. Namun, kesejahteraan nelayan skala kecil masih terhambat oleh fluktuasi cuaca, tingginya biaya operasional, kerentanan sosial-ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perikanan dan Pangan (DPP) Kota Padang, serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan teknik penentuan informan purposive sampling. Berdasarkan teori peran pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah telah dilaksanakan dalam tiga dimensi utama: 1) Sebagai regulator, pemerintah telah mengatur pembagian kewenangan, mekanisme pengajuan bantuan, dan pengawasan terhadap aktivitas perikanan; 2) Sebagai dinamisor, pemerintah melaksanakan penyuluhan, pembinaan, serta pendampingan kelembagaan kelompok nelayan; 3) Sebagai fasilitator, pemerintah mendistribusikan sarana penangkapan seperti mesin tempel, perahu, jaring, fish box, serta fasilitas perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Kesejahteraan Nelayan, Peran Pemerintah Daerah, Kota Padang.

Abstract

The marine and fisheries sector has a strategic role for the economy of coastal communities in Padang City. However, the welfare of small-scale fishermen is still hampered by weather fluctuations, high operational costs, socio-economic vulnerability, and limited access to assistance. This study aims to analyze and describe the role of the Marine and Fisheries Service (DKP) of West Sumatra Province and the Fisheries and Food Service (DPP) of Padang City, as well as the obstacles faced in improving the welfare of fishermen, especially in Bungus Teluk Kabung and Koto Tangah Districts. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation studies with purposive sampling informant sampling techniques. Based on the theory of the role of the government, the results of the study show that the role of local governments has been carried out in three main dimensions: 1) As a regulator, the government has regulated the division of authority, the mechanism for applying for assistance, and supervision of fishery activities; 2) As a dynamizer, the government carries out counseling, coaching, and institutional assistance for fishermen groups; 3) As a facilitator, the government distributes fishing facilities such as outboard machines, boats, nets, fish boxes, and BPJS Employment insurance protection facilities.

Keywords: Fishermen Welfare, Role of Local Government, Padang City

1. Pendahuluan

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta implementasi program peningkatan kapasitas penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keterkaitan erat antara kehidupan masyarakat pesisir dengan sumber daya kelautan dan perikanan. Wilayah pesisirnya membentang luas dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, menjadikannya ruang strategis bagi berlangsungnya berbagai aktivitas ekonomi, terutama perikanan tangkap yang menjadi sumber penghidupan utama bagi rumah tangga nelayan. Kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengoptimalkan hasil tangkapan, meningkatkan nilai tambah produk, memperoleh harga jual yang layak di pasar, serta mengembangkan kapasitas usaha perikanan secara berkelanjutan (Gushendri et al., 2022).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan pada umumnya memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja pada sektor ekonomi lainnya. Pendapatan rumah tangga nelayan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan hasil tangkapan, fluktuasi cuaca, dan kondisi usaha penangkapan yang

dilakukan sehari-hari. Produktivitas nelayan, lingkungan sosial budaya, stabilitas harga jual ikan di tingkat lokal, hingga kebahagiaan keluarga menjadi variabel penentu yang saling berkaitan erat (Gushendri et al., 2023).

Lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir juga sangat bergantung pada kemampuan rumah tangga nelayan dalam menciptakan nilai tambah dari kegiatan perikanan yang mereka lakukan. Nilai tambah tersebut sejatinya dapat diraih melalui perbaikan dalam seluruh rantai pasok perikanan, mulai dari efisiensi penangkapan, penanganan hasil tangkapan pascapanen, pengolahan produk, hingga kelancaran distribusi (Gushendri et al., 2022). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat nelayan melalui berbagai program pemberdayaan (Sitorus et al., 2022).

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, berdiri sebagai salah satu sentra utama perikanan tangkap. Berbatasan langsung dengan perairan Samudera Hindia, kegiatan penangkapan ikan menjadi denyut nadi perekonomian bagi ribuan warganya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyediaan fasilitas fisik oleh pemerintah tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila tidak diikuti oleh proses sosialisasi, penyebaran informasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkannya (Andriani et al., 2021).

Tabel 1.1 Jumlah Nelayan Kota Padang

Kecamatan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Bungus Teluk Kabung	1.715,00	1.713,00	1.710,00	1.708,00
Lubuk Kilangan	-	-	-	-
Lubuk Begalung	1.094,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
Padang Selatan	980,00	981,00	979,00	981,00
Padang Timur	-	-	-	-
Padang Barat	413,00	414,00	413,00	413,00
Kecamatan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Padang Utara	711,00	590,00	587,00	585,00
Nanggalo	38,00	160,00	156,00	156,00
Kuranji	-	-	-	-
Pauh	-	-	-	-
Koto Tangah	2.107,00	2.104,00	2.100,00	2.100,00

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2026

Signifikansi sektor perikanan di Kota Padang tercermin dari besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya di laut. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang tahun 2024, Kecamatan Koto Tangah tercatat memiliki 2.100 nelayan, sementara Kecamatan Bungus Teluk Kabung menaungi 1.708 nelayan. Besarnya jumlah nelayan ini menuntut hadirnya intervensi pemerintah daerah secara terencana dan terukur. Intervensi melalui pemberian sarana produksi telah terbukti mampu memberikan dampak ekonomi yang positif. Bantuan berupa mesin kapal 15 PK yang disalurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, misalnya, terbukti memiliki korelasi langsung dengan peningkatan pendapatan nelayan yang signifikan.

Intervensi pemerintah daerah dalam mendukung kapasitas produksi nelayan dapat dilihat secara nyata melalui tren penyaluran bantuan sarana prasarana. Berdasarkan data rekapitulasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, distribusi bantuan kepada kelompok nelayan mengalami dinamika dari tahun ke tahun, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Alat Tangkap

Tahun	Jumlah Kelompok	Sumber Bantuan
2024	6 Kelompok	APBD Kota Padang
2025	51 Kelompok	APBD Kota Padang, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN
2026	31 Kelompok	APBD Kota Padang

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2026

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah telah melakukan intervensi melalui pemberian bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan. Jumlah kelompok penerima bantuan meningkat drastis dari hanya 6 kelompok pada tahun 2024 menjadi 51 kelompok pada tahun 2025 (didukung oleh kolaborasi anggaran dari

tingkat Kota, Provinsi, hingga APBN), kemudian tercatat sebanyak 31 kelompok pada tahun 2026. Meskipun intervensi fisik ini menunjukkan komitmen pemerintah, pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada persoalan ketepatan sasaran dan keterbatasan anggaran (Bolkiah et al., 2021).

Implementasi kebijakan ini di kawasan Pasié Nan Tigo (Koto Tangah) merupakan bukti manifestasi upaya pemerintah lokal dalam merespons kerentanan sosial masyarakat pesisir, meskipun pada praktiknya masih dijumpai hambatan birokratis (Ramayanto et al., 2023). Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban menerapkan instrumen pengelolaan penangkapan terukur, guna memastikan kelestarian sumber daya sekaligus mengawal pendaratan hasil tangkapan di pelabuhan resmi (Pertasari et al., 2025). Berbagai rentetan permasalahan di atas menegaskan pentingnya meninjau ulang peran pemerintah daerah. Secara teoretis, dalam kajian administrasi publik, pemerintah dituntut untuk menjalankan perannya secara optimal yang terbagi ke dalam tiga dimensi utama: sebagai *regulator* (pembuat kebijakan dan aturan main), *dinamisator* (penggerak partisipasi masyarakat), serta *fasilitator* (penyedia sarana prasarana dan pendampingan) (Yusuf, 2014).

Keberhasilan program kesejahteraan nelayan sangat bergantung pada kualitas tata kelola administrasi dan kultur birokrasi yang proaktif, adaptif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Frinaldi, 2017; Frinaldi & Embi, 2011). Instansi pemerintah dituntut untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan harus memastikan setiap intervensi kebijakan tepat sasaran. Lebih lanjut, kesejahteraan nelayan tidak bisa diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi mencakup dimensi material, relasional, dan subjektif (Weeratunge et al., 2014). Oleh karena itu, penyaluran bantuan fisik (material) harus selalu diiringi dengan penguatan kelembagaan (relasional) agar menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji dinamika peran pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan, namun masih menyisakan ruang kosong (*research gap*). Penelitian Maulia et al. (2022) di Kabupaten Serdang Bedagai menyimpulkan bahwa bantuan pemerintah belum dirasakan optimal akibat meroketnya biaya operasional. Sementara itu, Ramdayanti et al. (2021) berfokus menganalisis peran pemerintah desa sebagai dinamisator bagi nelayan di Karawang. Studi lainnya oleh Nainggolan et al. (2023) di Deli Serdang menyoroti kendala minimnya kompetensi aparaturnya dan anggaran dalam memberdayakan ekonomi nelayan pesisir.

2. Metode Penelitian

Fokus lokasi penelitian ini bertempat di instansi sasaran program, yakni pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perikanan dan Pangan (DPP) Kota Padang, serta pada komunitas masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan dan karakteristik tertentu, di mana informan dinilai paling mengetahui dan memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Moleong, 2015). Informan dalam penelitian ini meliputi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda dan Ahli Pertama, Penyuluh Perikanan Ahli Madya, Pengawas Perikanan (PPNS), serta nelayan dari kedua kecamatan tersebut.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui informan kunci yang diamati dan dicatat untuk pertama kali (Suryani & Hendryadi, 2016). Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek di lapangan, dan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara lebih mendalam (Sugiyono, 2018). Sementara itu, data sekunder diperoleh lewat pihak lain dalam bentuk dokumen, laporan kinerja dinas, data statistik jumlah nelayan, rekapitulasi bantuan sarana prasarana, serta arsip pendukung lainnya dari instansi terkait (Ratnaningtyas et al., 2023). Untuk menjamin keabsahan data kualitatif yang diperoleh di lapangan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Proses pengujian kredibilitas data dilakukan melalui dua cara, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2012).

Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dengan menggunakan sistem koding, dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2015). Selain itu, guna mempertajam analisis mengenai peran dan strategi instansi pemerintah, penelitian ini juga mengaplikasikan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) secara sistematis, yang kemudian diformulasikan ke dalam matriks strategi (seperti strategi SO, ST, WO, dan WT) untuk merumuskan langkah paling efektif dalam mengoptimalkan pemberdayaan dan kesejahteraan nelayan di Kota Padang (Kusbandono, 2019; Rangkuti, 2005).

3. Hasil dan Pembahasan

1). Geografis, Kelembagaan, dan Paradigma Kesejahteraan Nelayan

Peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir membutuhkan intervensi yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi perairan laut seluas 186.580 km² dan garis pantai 2.312,71 km, menjadikannya daerah dengan potensi perikanan tangkap yang masif. Di tingkat lokal, Kota Padang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, menaungi belasan ribu masyarakat pesisir yang perekonomiannya sangat bergantung pada perikanan tangkap, khususnya di sentra utama seperti Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah.

Kesejahteraan nelayan tidak dapat dipandang hanya dari akumulasi hasil tangkapan harian. Mengacu pada kerangka konseptual yang diadopsi dari Weeratunge et al. (2014), kesejahteraan (*wellbeing*) komunitas nelayan skala kecil merupakan konstruksi multidimensi yang terdiri atas dimensi material, relasional, dan subjektif. Dimensi material mencakup tingkat pendapatan dan kepemilikan aset sarana tangkap; dimensi relasional meliputi interaksi sosial dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan akses pelayanan birokrasi; sedangkan dimensi subjektif merujuk pada rasa aman, kepuasan kerja, dan optimisme nelayan terhadap masa depannya (Weeratunge et al., 2014).

Kajian di pesisir Sumatera Barat menegaskan bahwa produktivitas dan kebahagiaan keluarga nelayan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka menciptakan nilai tambah dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Gushendri et al., 2022). Lebih lanjut, Gushendri et al. (2023) menemukan bahwa nelayan tradisional di wilayah ini memiliki tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi akibat ketidakpastian iklim dan fluktuasi tangkapan. Realitas di Kota Padang masih didominasi kerentanan ini, diperparah oleh minimnya sarana produksi, mahalnya biaya operasional, serta keterbatasan modal yang kerap memaksa nelayan terjatuh utang kepada rentenir.

2). Hasil Reduksi Data dan Koding Wawancara

Guna memahami lebih dalam implementasi program pemberdayaan tersebut, penelitian ini melakukan proses reduksi data terhadap transkrip wawancara dengan para informan kunci, yang terdiri atas staf ahli DKP Provinsi, penyuluh perikanan Kota Padang, pengawas perikanan, serta perwakilan nelayan dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah. Tema-tema sentral yang diklasifikasikan dari proses koding disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Koding dan Reduksi Data Wawancara

Rumusan Masalah	Unsur	Data		Refleksi/Penjelasan
		Informan	Wawancara	
Peran pemerintah dan lembaga dalam mendukung kehidupan kesejahteraan nelayan	Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan perikanan	Informan 1, Informan 3	Terdapat pembagian wilayah kewenangan pengelolaan perikanan, di mana DKP Provinsi mengatur wilayah hingga 12 mil (termasuk 7 kabupaten/kota pesisir), sedangkan wilayah pantai menjadi kewenangan kabupaten/kota.	Pemerintah memiliki pembagian kewenangan dalam pengelolaan perikanan. DKP provinsi menjalankan kewenangan pada wilayah yang menjadi cakupannya, sedangkan kabupaten/kota memiliki wilayah kewenangan tertentu. Pembagian tersebut menjadi dasar pelaksanaan program, pengawasan, dan pembinaan nelayan.
Kendala Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan	Kondisi pendapatan nelayan	Informan 6, Informan 7	Pendapatan nelayan tidak menentu; terkadang bisa mencapai	Data menunjukkan pendapatan nelayan tidak selalu tetap. Pada kondisi tertentu

Kesejahteraan Nelayan di Kota Padang			Rp500 ribu sehari, namun saat sepi penghasilan sangat minim sehingga nelayan merasa tidak sejahtera.	pendapatan dapat mencapai jumlah tertentu, sedangkan ketika hasil tidak ada, pendapatan menjadi sedikit. Nelayan Bungus secara langsung menyatakan bahwa dirinya tidak sejahtera.
---	--	--	--	---

3). Implementasi Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Peran pemerintah dalam sektor perikanan Kota Padang mencakup dua hal utama, yakni sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah merumuskan kebijakan, memastikan pengawasan, dan mencegah eksploitasi (Yusuf, 2014; Rasyid, 2000; Arif, 2012) melalui verifikasi ketat penyaluran bantuan, penindakan *illegal fishing* bersama aparat, serta inovasi jemput bola 'Gerai Perizinan'. Sementara itu, sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Yusuf, 2014; Arif, 2012) melalui pemberian bantuan alat tangkap, *fish box*, dan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Meskipun demikian, keterbatasan dan ketidakmerataan alokasi bantuan tersebut memicu kekecewaan nelayan di kawasan seperti Pasia Nan Tigo dan Bungus, yang pada akhirnya memunculkan persepsi ketimpangan sosial di tingkat *grassroots*.

4). Evaluasi Strategi Melalui Matriks Analisis SWOT

Guna meramu rekomendasi kebijakan publik yang presisi dan aplikatif, penelitian ini memetakan kondisi empiris di atas ke dalam instrumen manajemen strategis Analisis SWOT (Kusbandono, 2019). Menurut Rangkuti (2005), analisis SWOT bertujuan menstrukturkan logika perumusan strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan ancaman dan kelemahan internal institusi. Formulasi tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Analisis SWOT Peran Pemerintah Daerah di Sektor Perikanan Kota Padang

Analisis Internal & Eksternal	Strengths (S) / Kekuatan: 1. Mandat hukum dan otonomi yang kuat pada DKP dan DPP. 2. Sinergitas koordinasi yang baik dengan instansi penegak hukum. 3. Eksistensi jaringan tenaga penyuluh perikanan di lapangan. 4. Berjalannya program pengadaan aset produktif nelayan.	Weaknesses (W) / Kelemahan: 1. Persepsi nelayan tentang distribusi bantuan yang timpang/tidak merata. 2. Pemotongan APBD yang membekukan program pelatihan. 3. Defisit kuantitas SDM penyuluh pengawas. 4. Masih banyaknya kapal tanpa perizinan legal.
Opportunities (O) / Peluang: 1. Akses pembiayaan kredit mikro perbankan (KUR). 2. Adanya fasilitas jaminan asuransi ketenagakerjaan (BPJS). 3. Kemajuan teknologi navigasi dan alat tangkap modern. 4. Keterlibatan masyarakat melalui Pokmaswas.	Strategi SO (Strengths-Opportunities): Memanfaatkan SDM penyuluh perikanan (S) untuk mendampingi kelompok nelayan dalam menyusun studi kelayakan bisnis sederhana agar dapat mengakses modal KUR (O). Modal ini digunakan untuk swadaya membeli teknologi alat tangkap modern, mengurangi ketergantungan absolut pada bantuan hibah APBD.	Strategi WO (Weaknesses-Opportunities): Memanfaatkan potensi pendanaan eksternal seperti skema CSR perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) (O) untuk menambal kelemahan pemotongan anggaran APBD (W), sehingga program pelatihan keahlian nelayan dapat kembali berjalan. Memperluas digitalisasi layanan perizinan (O) untuk mempermudah kapal kecil mendapatkan legalitas dengan cepat (W).
Threats (T) / Ancaman: 1. Cuaca ekstrem, badai, dan fluktuasi iklim laut.	Strategi ST (Strengths-Threats): Memaksimalkan jaringan Pokmaswas dan kewenangan operasi gabungan TNI/Polairud (S)	Strategi WT (Weaknesses-Threats): Memprioritaskan anggaran terbatas (W) murni untuk

2. Praktik mafia <i>illegal & destructive fishing</i> . 3. Meroketnya harga BBM dan biaya perawatan kapal. 4. Ketidakstabilan harga jual ikan segar di pasar (monopoli tengkulak).	untuk memberangus tindak pidana <i>destructive fishing</i> yang merusak habitat ikan (T). Mengintegrasikan <i>database</i> penerima aset (S) ke dalam jaminan BPJS (T) secara otomatis untuk melindungi risiko kematian nelayan.	intervensi mitigasi krisis iklim (T), misalnya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan pascapanen bagi istri nelayan (pengolahan ikan asin, abon) agar rumah tangga memiliki <i>income</i> alternatif saat gelombang tinggi membuat suami tidak bisa melaut.
--	--	--

Analisis SWOT menunjukkan bahwa penanganan sektor perikanan di Kota Padang harus melampaui sekadar pemberian bantuan modal. Strategi S-O menuntut pemerintah bertransformasi menjadi *enabler* untuk mendorong inklusi keuangan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Sementara itu, Strategi W-T memperingatkan bahwa kelemahan birokrasi, cuaca ekstrem, dan kelangkaan BBM merupakan ancaman serius. Oleh karena itu, kelompok nelayan perlu direstrukturisasi menjadi koperasi berbadan hukum. Transformasi ini krusial untuk memutus ketergantungan pada tengkulak, meningkatkan ketahanan keluarga di musim paceklik, dan mewujudkan kesejahteraan nelayan secara multidimensi (Kusbandono, 2019).

4. Kesimpulan

Peran DKP Provinsi Sumatera Barat dan DKP Kota Padang dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan diwujudkan melalui tiga dimensi utama. Pertama, sebagai regulator, pemerintah menetapkan pembagian yurisdiksi pengelolaan laut, menegakkan hukum terhadap *illegal fishing*, serta memastikan kepatuhan dokumen perizinan kapal. Kedua, sebagai dinamisor, pemerintah mendorong partisipasi dan kemandirian nelayan lewat penyuluhan, pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), edukasi perawatan alat tangkap, dan sosialisasi teknologi ramah lingkungan. Ketiga, sebagai fasilitator, pemerintah mendistribusikan sarana produksi (mesin tempel, perahu, jaring, kotak pendingin) serta menyediakan perlindungan sosial berupa asuransi ketenagakerjaan untuk menjamin keselamatan kerja para nelayan di laut.

Reference

- Andriani, M., et al. (2021). Evaluasi pemanfaatan fasilitas cold chain dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan di Kota Padang. *Jurnal Teknologi Perikanan*, 14(2), 45–56.
- Arif, M. (2012). *Peran pemerintah daerah dalam pembangunan*. Alfabeta.
- Bolkiah, M., et al. (2021). Evaluasi program pemberdayaan nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 11–23. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.439>
- Frinaldi, A. (2017). *Kultur birokrasi dan pelayanan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris*. UNP Press.
- Frinaldi, A., & Embi, M. A. (2011). Faktor budaya kerja birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 112–124. <https://doi.org/10.24036/jian.v11i2.112>
- Gushendri, R., Aimon, H., & Sentosa, S. U. (2022). Determinants of improving the welfare of fishermen's households in the coastal areas of West Sumatera. *Journal of Coastal Economics*, 10(1), 22–38. <https://doi.org/10.18280/ijssdp.170829>
- Gushendri, R., Putra, A., & Handayani, S. (2023). Tingkat kecemasan dan kerentanan sosial ekonomi nelayan tradisional di pesisir Sumatera Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 18(2), 189–201. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v18i2.189>
- Kusbandono, D. (2019). *Manajemen strategis: Analisis SWOT*. CV. Budi Utama.
- Maulia, D., Rambe, T., Luvita, S., Harahap, B., Sijabat, R., & Ainun, N. (2022). Analisis peran pemerintah daerah terhadap kesejahteraan nelayan di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 112–125. <https://doi.org/10.52562/joulage.v1i2.445>
- Nainggolan, E., Hartono, B., & Adam, M. (2023). Peran dinas perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 77–89. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1438>
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.
- Pertasari, Y., Yuliani, E., & As'ari, A. (2025). Kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di Kota Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Tata Kelola Kelautan*, 8(1), 40–52. <https://doi.org/10.31849/ewf85361>
- Ramayanto, R., et al. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 11(4), 210–225. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.104>
- Ramdayanti, S., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 34–48. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Rangkuti, F. (2005). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. PT Mutiara Sumber Widya.
- Siagian, S. P. (2003). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Sitorus, M., et al. (2022). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui optimalisasi sektor perikanan tangkap. *Jurnal Pembangunan Kelautan*, 8(2), 55–67.
- Weeratunge, N., Béné, C., Siriwardane, R., Charles, A., Johnson, D., Allison, E. H., Nayak, P. K., & Badjeck, M.-C. (2014). Small-scale fisheries through the wellbeing lens. *Fish and Fisheries*, 15(2), 255–279. <https://doi.org/10.1111/faf.12016>
- Yusuf, I. (2014). *Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat*. Pustaka Setia.